

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan

Village Government Strategy for Physical Development in Aji Kuning Village, Central Sebatik District, Nunukan Regency

Rusdin¹, Jauchar², Nur Hasanah³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 03
Page : 84-91
Published : 2021

KEYWORDS

Strategy, Physical Development, Aji Kuning Village

CORRESPONDENCE

E-mail: rusdin9596@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to determine the strategy undertaken by the Village Government of Aji Kuning in carrying out physical development. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative descriptive research method and is a field research using data obtained from observation, interviews, documentation and secondary data. The results of the study show that in carrying out physical development the village has several strategies, namely in formulating a vision and mission through a bottom up approach, namely prioritizing community interests, development planning that looks at environmental aspects so that in development it also prioritizes natural disaster management, guarantees apparatus capacity by increasing capacity village apparatus through training and technical guidance, motivating the apparatus so that the competition that occurs can be positive in order to improve the work ethic and establish good communication and coordination with internal and external parties. From the several strategies carried out, it can be seen that the pattern of development strategy used is the pattern of integrated rural development. In the process of implementing development, there are also supporting and inhibiting factors. The supporting factors are the high participation of the village community in the stages of planning, implementation, up to monitoring the evaluation of the results of physical development and the existence of an attitude of transparency on the part of the Village Government in terms of implementing physical development. The inhibiting factor is the lack of human resources, namely technical experts and also the difficulty in obtaining heavy equipment assistance in supporting the development implementation process.

INTRODUCTION

Negara dibentuk dengan tujuan mencapai cita-cita bangsa. Di Indonesia, tujuan negara terdapat pada konstitusi yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dilaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Kendati demikian, dapat dilihat bahwa efektivitas pembangunan belum sepenuhnya terealisasikan karena

pembangunan nasional terlaksana tidak merata. Pembangunan giat dilaksanakan di wilayah kota-kota besar sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di wilayah perdesaan sehingga masyarakat desa tidak dapat menikmati pembangunan yang ada. Pembangunan yang bertumpu ke arah perkotaan secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.

Melihat serius permasalahan ini, wilayah perdesaan kemudian menjadi salah satu fokus

pembangunan nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui programnya yaitu Nawa Cita. Pada poin ketiga dalam program tersebut dinyatakan bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Implementasi kebijakan program Nawa Cita direalisasikan dengan adanya pemberian bantuan sumber pendapatan desa dengan hadirnya program Dana Desa untuk kesejahteraan rakyat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Sebagai badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan dalam hal ini pemerintah desa harus mempunyai strategi yang efektif dan efisien.

Wilayah perdesaan adalah wilayah yang identik dengan kekurangan dan keterbatasan. Terlepas dari permasalahan tersebut, Pemerintah Desa harus mengatasi semua kelemahan yang ada dengan menemukan solusi dan strategi yang tepat dalam melaksanakan pembangunan. Meskipun telah diberikan pendanaan yang cukup besar, tuntutan terhadap kesiapan Pemerintah Desa dalam merencanakan strategi pembangunan sangat diperlukan karena tanpa perencanaan yang baik pendanaan yang ada tidak dapat memberikan hasil yang maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sebuah fenomena yang menarik dimana sebuah desa yang terletak di sebuah pulau di daerah perbatasan negara yang mana desa tersebut dapat melaksanakan pembangunan

dengan baik. Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019 di jelaskan bahwa desa tersebut telah berhasil menjadi desa maju. Desa yang dimaksud adalah Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah.

Penelitian ini akan mengkaji tentang strategi pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di desa tersebut. Dalam melaksanakan suatu pembangunan yang baik terlebih lagi pada pembangunan fisik, hal tersebut tidak akan terlepas dari perencanaan atau strategi yang baik pula. Oleh sebab itu, penulis kemudian tertarik untuk melaksanakan penelitian untuk menganalisa lebih mendalam lagi terkait strategi pembangunan fisik di desa tersebut.

THEORETICAL FRAMEWORK

Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang berarti tentara, sedangkan kata “agein” dapat diartikan sebagai memimpin. Jika disederhanakan, strategi dimaksudkan sebagai memimpin tentara. Menurut Sondang P. Siagian (2004) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasi oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini, strategi diartikan sebagai suatu keputusan atau kebijakan yang dibuat petinggi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam sebuah organisasi. Adapun menurut Kooten dalam Salusu (2006) mengatakan bahwa strategi adalah hal yang membahas mengenai *organization goal*, lingkungan, kemampuan internal, kompetis dan komunikasi dalam suatu organisasi.

Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006), tipe-tipe strategi meliputi Strategi Organisasi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategi yang baru. Strategi Program yaitu strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi suatu program tertentu, Strategi Pendukung Sumber Daya yaitu strategi yang memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja organisasi serta Strategi Kelembagaan yang berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategi. Strategi kelembagaan ini merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Syafie (2005) terdiri dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dimana lembaga eksekutif desa adalah kepala desa sedangkan lembaga legislatif adalah badan permusyawaratan desa (BPD) yang merupakan wakil-wakil penduduk desa yang dipilih oleh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah, pemerintah desa akan diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa.

Desa

Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (2015), desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian dan perikanan. Menurut Adon Nasrullah (2015), desa merupakan kumpulan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), desa kemudian dikategorikan menjadi beberapa bagian yakni kategori desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Menurut W.W Rostow dalam Abdul (2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Menurut Kuncoro (2010) pembangunan fisik adalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum. Adapun pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama seperti peningkatan

perekonomian rakyat desa serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Pembangunan Desa

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa diperoleh melalui pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 78 ayat 3 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa diaturkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang bertahap yang mana melibatkan Pemerintah Desa dan juga masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan objek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan desa dapat dilaksanakan dalam beberapa strategi. Menurut Usman (2012), program-program pembangunan perdesaan dapat dilaksanakan melalui strategi atau program pembangunan pertanian (*agricultural development*), industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*), pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*) dan strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*). Sedangkan menurut Hagul (2000) menjelaskan tentang empat strategi pembangunan daerah perdesaan yaitu dengan strategi modernisasi pertanian, strategi anti kemiskinan, strategi pola baru pertumbuhan dan strategi *land reform*. Dalam menentukan atau memilih suatu strategi pembangunan desa hendaklah berdasarkan

pengamatan yang teliti dengan melihat pada situasi dan kondisi desa dan masyarakat desa.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi serta data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, dan 8 orang masyarakat desa. Data yang terkumpul kemudian penulis analisa melalui metode penelitian kualitatif dengan teknis deskriptif. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan Millles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

Strategi Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Fisik di Desa Aji Kuning

Strategi merupakan suatu hal penting yang harus disiapkan sebelum melakukan suatu program agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan atau hasil yang diinginkan. Demikian juga halnya terhadap pembangunan fisik di desa. Dalam menganalisis strategi yang telah digunakan oleh Pemerintah Desa Aji Kuning dalam pelaksanaan pembangunan fisik, digunakan pendekatan konsep strategi dari Kooten dalam Salusu (2006) yang mengatakan bahwa dalam hal membahas strategi itu melihat pada aspek tujuan organisasi, lingkungan, kemampuan internal, kompetisi serta komunikasi.

Tujuan Organisasi

Dalam organisasi pemerintahan, secara garis besar tujuan organisasi tersebut dibentuk

dan ditetapkan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Maka dari itu, tujuan organisasi pemerintah baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah seperti pemerintahan di desa harus sejalan dan searah meskipun dalam konteks kalimat yang berbeda. Secara lebih rinci tujuan dari Pemerintah Desa Aji Kuning ini dapat dilihat visi dan misi yang mereka tetapkan. Visi dan misi sendiri memiliki keterkaitan erat dengan aspek tujuan, strategi kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Pemerintah Desa juga akan dapat bekerja dengan baik jika memiliki visi dan misi yang jelas.

Adapun dalam merumuskan visi dan misi, strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Aji Kuning menggunakan pendekatan *bottom up*. Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat desa dengan bersama-sama membahas apa yang akan menjadi fokus dan tujuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, visi dan misi dapat ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dalam penggalian gagasan dan potensi yang dominan yang dimiliki oleh desa sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dapat dilakukan dengan baik.

Lingkungan

Suatu organisasi sebagai sistem tidak terlepas dari lingkungannya sehingga sasaran (tahap perencanaan) yang dibentuk selalu dipengaruhi oleh lingkungan, juga sasaran dalam organisasi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungannya, artinya antara lingkungan dengan organisasi sebagai suatu sistem memiliki hubungan timbal balik. Faktor lingkungan yang dimaksud terdiri lingkungan internal Pemerintah Desa serta lingkungan eksternal yang dapat berupa kondisi masyarakat dan kondisi alam di desa.

Dalam hal pembangunan fisik, Pemerintah Desa Aji Kuning sangat memperhatikan kondisi lingkungannya dalam menetapkan strategi pembangunan. Pada lingkungan internal, Pemerintah Desa memaksimalkan Pendamping Desa untuk mendapatkan saran dan masukan yang sangat berguna dalam proses perencanaan pembangunan fisik. Adapun pada lingkungan eksternal, pihak desa melakukan pemetaan kondisi lingkungan seperti pemetaan musim dan pemetaan kawasan rawan bencana. Dinilai dari hal itu, maka ada pembangunan yang langsung menjadi skala prioritas. Adanya penilaian atau memperhatikan aspek lingkungan ini kemudian dapat lebih memudahkan bagi Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi hal-hal yang bisa menjadi penghambat atau pendorong dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Kemampuan Internal

Kemampuan internal ialah kekuatan yang dimiliki dalam diri untuk mencapai tujuan, kemampuan internal berhubungan dengan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sumber daya materi dan budaya. Sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan aparatur desa. Kapasitas mengenai sumber daya aparatur desa dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan hasil kinerja mereka. Kapasitas para aparatur juga sangat dapat mempengaruhi dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan fisik di desa.

Adapun melihat dari latar belakang pendidikan terakhir para aparatur Desa Aji Kuning, mayoritas hanya lulusan Sekolah Menengah Atas. Meskipun itu tidak melanggar aturan atau syarat administrasi untuk menjadi aparatur desa, beberapa orang dari aparatur kemudian berinisiatif melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka untuk mendapatkan gelar sarjana serta meningkatkan kapasitas mereka. Pihak Pemerintah Desa kemudian

dalam upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya turut melakukan pelatihan dan bimbingan teknis. Pemerintah Desa Aji Kuning memandang serius mengenai peningkatan kapasitas aparaturnya. Setiap ada undangan terkait pelatihan aparatur, maka pihak desa akan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan.

Kompetisi

Kompetisi merupakan hal yang penting dalam suatu strategi. Kompetisi tersebut dijalankan untuk pengembangan diri karena dituntut adanya perumusan strategi agar kompetisi yang dijalankan dapat menghasilkan perubahan yang positif. Organisasi yang mengabaikan faktor kompetisi akan cepat merasa puas terhadap hasil yang ada sehingga dalam organisasi tersebut proses inovasi akan mengalami stagnasi dan terhenti. Pada organisasi pemerintahan desa sangat diperlukan inovasi-inovasi baru terutama dalam hal pembangunan. Oleh karena itu, dalam lingkup internal aparatur desa harus terjadi suatu kompetisi yang sehat agar kegiatan penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar. Situasi seperti ini yang kemudian turut terjadi dalam Pemerintahan Desa Aji Kuning.

Strategi yang digunakan adalah dengan menciptakan kultur atau lingkungan kerja yang sehat. Kompetisi tetap berjalan akan tetapi dalam hal yang positif sehingga tidak ada sikap saling menjatuhkan antar sesama aparatur. Pimpinan dalam hal ini Kepala Desa senantiasa memotivasi dan mengawasi para aparatur agar selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dengan terciptanya iklim kompetitif yang sehat, setiap individu maupun satuan kerja akan terpacu untuk bekerja keras serta menampilkan kinerja yang terbaik. Hal ini kemudian menjadi salah satu pendorong dalam kesuksesan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Aji Kuning.

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan strategi karena dengan adanya komunikasi menciptakan kesepahaman bersama. Dengan terciptanya kesepahaman maka akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi antar sub-sub bagian dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu secara internal antar pihak aparatur desa dan secara eksternal seperti komunikasi kepada masyarakat, pihak BPD, para pengusaha dan lain-lain.

Dalam upaya untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik secara internal, pihak Pemerintah Desa mengadakan rapat rutin pada setiap minggu. Tidak hanya itu, agar suatu informasi dapat tersampaikan dengan lebih cepat, pihak desa turut memanfaatkan media sosial. Adapun secara eksternal, pihak desa membuka ruang komunikasi secara luas baik kepada pihak masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik. Hal yang terpenting dalam melaksanakan strategi pembangunan adalah dengan melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat desa karena masyarakat desa merupakan subyek dari pelaksanaan suatu program pembangunan. Oleh sebab itu, pihak desa sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Fisik di Desa Aji Kuning

Faktor Pendukung

Salah satu hal yang dapat merealisasikan pembangunan fisik yang baik selain diawali dengan perencanaan atau strategi yang matang adalah dikarenakan adanya faktor pendukung. Demikian juga halnya dalam strategi pembangunan fisik di Desa Aji Kuning. Adapun

faktor pendukung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di desa tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat desa yang tinggi mulai dari keaktifan dan antusias masyarakat dalam tahapan perencanaan dengan ikut menyumbangkan ide serta saran kritik dalam kegiatan musrenbang, ikut serta membantu pihak desa untuk mendapatkan dana tambahan dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan juga berpartisipasi dalam proses mengevaluasi hasil kinerja Pemerintah Desa dalam urusan pembangunan fisik.

Tidak hanya itu, faktor pendukung juga terdapat pada internal pemerintahan desa yaitu adanya integritas yang tinggi dalam melaksanakan asas transparansi dalam urusan pembangunan fisik. Informasi terkait pembangunan fisik dapat masyarakat akses dan ketahui sehingga masyarakat bisa mengevaluasi atau mengontrol pihak desa agar tidak melakukan penyelewengan. Pihak desa membuka seluas-luasnya akses kepada masyarakat terkait dana realisasi pembangunan dengan mencetak baliho yang kemudian dipasang di tempat umum serta dipinggir jalan utama desa tersebut. Dengan adanya sikap keterbukaan ini kemudian dapat mempengaruhi hubungan kerjasama yang bersifat positif antar Pemerintah Desa dengan masyarakat yang kemudian berjalan beriringan dalam hal pembangunan fisik.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala yang mengakibatkan suatu kegiatan menjadi terhambat sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan fisik di Desa Aji Kuning, terdapat hambatan yang mempengaruhi jalannya proses pembangunan fisik yaitu kekurangan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah tenaga ahli konstruksi. Pihak desa hanya dapat mengandalkan seorang pendamping teknis desa yang mana pendamping tersebut juga

bertanggung jawab terdapat semua desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Dengan banyaknya pelaksanaan pembangunan fisik dalam setiap tahun dan harus diawasi oleh tenaga ahli maka hal ini menjadi hambatan bagi pihak desa.

Selain itu, hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Aji Kuning adalah kesulitan untuk mendapatkan bantuan alat berat. Alat berat digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan infrastruktur desa. Hambatan ini terjadi dikarenakan ketersediaan alat berat di Pulau Sebatik sangat minim. Tidak hanya itu, untuk mendapatkan alat berat juga harus mengantre menunggu giliran untuk menyewa alat berat tersebut. Ini kemudian berdampak pada pelaksanaan pembangunan fisik di desa.

KESIMPULAN

1. Strategi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Aji Kuning meliputi pembentukan konsep dan perencanaan strategi yang matang. Beberapa strategi kemudian dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa yaitu:
 - a. Pembentukan visi dan misi desa dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan menggunakan konsep *bottom up* pihak desa kemudian mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
 - b. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memprioritaskan pada kemudahan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa akan tetapi melihat juga pada sisi pembangunan untuk menangani bencana alam yang terjadi di desa.
 - c. Mengedepankan profesionalitas dan kapasitas aparatur desa juga turut ditingkatkan melalui pelatihan-

pelatihan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

- d. Menghindari terjadinya kompetisi yang tidak sehat seperti perilaku saling menjatuhkan dengan cara memberikan motivasi kepada para aparatur yang kemudian berdampak pada peningkatan etos kerja.
 - e. Melakukan komunikasi secara terbuka baik kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Desa serta memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pembangunan fisik di Desa Aji Kuning yaitu adanya partisipasi masyarakat desa yang tinggi baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemantauan evaluasi hasil pembangunan serta adanya sikap keterbukaan dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia yaitu pada tenaga ahli teknis dan juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan alat berat dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan.

REFERENSI

- Hagul, P. 2000. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN* Yogyakarta.
- Ndraha, Talizuhu. 2000. "Metodologi Pemerintahan Indonesia". Jakarta: PT Bina Aksara,
- Nurman, 2015. "Strategi Pembangunan Daerah". Jakarta: Raja Grafindo Persada

Salusu, J., 2005, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

Sumaryadi, I. Nyoman, 2010. "Sosiologi Pemerintahan". Bogor: Ghalia Indonesia

Syafie, Inu Kencana. 2001. "Pengantar Ilmu Pemerintahan". Bandung: PT Refika Aditama

Usman, S. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja

W.W. Rostow, "The Stage of Economic Growth" tentang the five stages of growth a summary

Sumber Internet :

Wedhaswary, Inggried Dwi. 2014. "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.

<https://nasional.kompas.com> diakses tanggal 28 November 2020

Victo, Ardika. 2019. *Peraturan Dana Desa*.

<https://danadesa.id> diakses tanggal 29 November 2020

Berita Desa. 2018. *Ini Dia 3 Tingkatan Klasifikasi Desa Berdasarkan*

Perkembangannya <https://www.berdesa.com> diakses tanggal 1 Desember 2020

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Dasar 1945 alinie IV

Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa
Permendes No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM)